

Tata Kelola Global di Tengah **Krisis Multilateral:** Reformasi PBB, WTO, dan G20



Oleh Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: **Tata Kelola Global di Tengah Krisis
Multilateral - Reformasi.PBB.WTO.dan.G20**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)
Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991
Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)
Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)
AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

23 Februari 2026

Bogor, Indonesia

TATA KELOLA GLOBAL DI TENGAH KRISIS MULTILATERAL - REFORMASI PBB, WTO, DAN G20

Krisis multilateralisme pada dekade ini bukan sekadar krisis “forum”, tetapi krisis **kapasitas kolektif umat manusia untuk bertindak bersama**. Di satu sisi, tantangan global justru makin saling terkait: perang, perubahan iklim, utang, gangguan rantai pasok, ketimpangan digital, AI, pangan, migrasi, dan krisis kepercayaan publik. Di sisi lain, lembaga-lembaga internasional yang dirancang untuk mengelola koordinasi lintas negara—terutama PBB, WTO, dan G20—menghadapi tekanan geopolitik, fragmentasi kepentingan, dan keterbatasan institusional yang semakin nyata. Reuters bahkan merangkum situasi ini melalui pernyataan Sekretaris Jenderal PBB pada Februari 2026 yang menyerukan arsitektur keamanan internasional yang “diperbarui” karena tatanan keamanan pasca-Perang Dunia II sedang bergeser cepat.

[\(Reuters\)](#)

Dalam konteks akademik, krisis ini dapat dibaca sebagai **krisis legitimasi, efektivitas, representasi, dan pembiayaan** secara simultan. Legitimasi melemah ketika institusi dinilai tidak mencerminkan distribusi kekuatan dan kepentingan dunia saat ini (misalnya isu representasi Global South di Dewan Keamanan PBB atau tata kelola ekonomi global). Efektivitas menurun ketika proses konsensus buntu dan keputusan tertunda. Representasi dipersoalkan karena struktur keanggotaan dan hak veto/agenda masih mewarisi konfigurasi sejarah lama. Pembiayaan menjadi rapuh ketika kontribusi negara anggota tertunda, prioritas politik domestik berubah, dan biaya penanganan krisis meningkat.

Semua ini menghasilkan fenomena yang dapat disebut sebagai **multilateralisme bertekanan tinggi**: kebutuhan kolaborasi meningkat, tetapi kemampuan institusi untuk mengonsolidasikan konsensus justru melemah.

Tulisan ini membahas bagaimana krisis multilateralisme tersebut tercermin dalam tiga pilar penting tata kelola global: **PBB** (keamanan, legitimasi normatif, dan koordinasi universal), **WTO** (aturan perdagangan dan penyelesaian sengketa), dan **G20** (koordinasi ekonomi-politik tingkat pemimpin). Fokus pembahasan bukan hanya “apa yang rusak”, melainkan juga **arah reformasi yang sedang berlangsung** dan **apa desain kebijakan yang realistis** bagi negara-negara Global South—termasuk Indonesia—untuk berperan aktif, bukan sekadar menjadi objek dari perubahan.

1) Memahami Krisis Multilateral sebagai Krisis Arsitektur, Bukan Hanya Krisis Diplomasi

Secara klasik, multilateralisme dipahami sebagai kerja sama berbasis aturan, institusi, dan prosedur yang disepakati banyak negara. Namun, dalam praktik kontemporer, multilateralisme tidak berjalan di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh tiga lapisan sekaligus:

Lapisan kekuasaan (power politics): rivalitas negara besar, perang, sanksi, proteksionisme, kompetisi teknologi;

Lapisan institusi (rules and process): prosedur voting, veto, konsensus, sekretariat, mandat, pendanaan;

Lapisan legitimasi sosial-politik (public trust): persepsi keadilan, hasil nyata, transparansi, akuntabilitas.

Krisis saat ini terjadi karena ketiga lapisan tersebut mengalami tekanan bersamaan. Dalam banyak kasus, negara-negara tetap datang ke forum multilateral, tetap berpidato, bahkan tetap menghasilkan deklarasi. Akan tetapi, **kemampuan sistem untuk menghasilkan barang publik global (global public goods)**—perdamaian, stabilitas, aturan perdagangan yang dapat ditegakkan, pendanaan transisi, respons krisis—tidak sebanding dengan besarnya tantangan.

Karena itu, reformasi multilateral tidak cukup dipahami sebagai revisi teks, amandemen prosedur, atau penambahan agenda. Reformasi harus dibaca sebagai **re-desain arsitektur eksekusi global**, yaitu: siapa yang memutuskan, siapa yang membiayai, siapa yang memantau, siapa yang menanggung biaya politik, dan bagaimana kepatuhan dibangun ketika konsensus penuh tidak tersedia.

Di sinilah PBB, WTO, dan G20 menampilkan tiga tipe masalah yang berbeda namun saling terkait:

PBB: legitimasi universal kuat, tetapi eksekusi dan pendanaan menghadapi tekanan serius;

WTO: aturan hukum perdagangan kuat secara historis, tetapi fungsi penyelesaian sengketa tingkat banding lumpuh;

G20: lincah dan politis, tetapi tidak universal dan tidak mengikat secara hukum.

Analisis yang produktif bukanlah memilih salah satu, melainkan memahami bagaimana ketiganya dapat saling mengisi celah kelembagaan.

2) PBB di Tengah Krisis Multilateral: Antara Universalitas, Mandat yang Membengkak, dan Keterbatasan Eksekusi

2.1 PBB sebagai pusat legitimasi universal yang makin dibebani ekspektasi

PBB tetap merupakan forum paling universal dengan 193 negara anggota. Dalam situasi dunia yang terbelah, justru forum universal menjadi semakin penting karena ia menyediakan ruang minimum untuk dialog, legitimasi normatif, dan koordinasi lintas isu. Namun, universalisme itu datang dengan biaya: **mandat yang sangat luas, ekspektasi yang besar, dan ketergantungan pada kemauan politik negara anggota.**

Krisis PBB hari ini bukan hanya karena "gagal mencegah konflik", tetapi juga karena **ketidaksesuaian antara mandat yang meluas dan kapasitas yang tersedia.** Tekanan ini terlihat dari dua perkembangan besar:

upaya **reinvigorasi agenda reformasi sistemik** melalui *Pact for the Future* (2024); dan

upaya **efisiensi dan restrukturisasi internal** melalui **UN80 Initiative** (2025–2026). ([AP News](#))

2.2 Pact for the Future: penting sebagai sinyal politik, tetapi tantangan utamanya adalah implementasi

Pada September 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi *Pact for the Future* sebagai cetak biru untuk menghadapi tantangan abad ke-21. AP mencatat bahwa pakta setebal 42 halaman itu memuat **56 aksi** dan diadopsi di tengah dunia yang semakin terbelah, bahkan setelah proses politik yang sempat tegang. ([AP News](#))

Nilai penting pakta ini ada pada tiga hal.

Pertama, ia mengakui secara eksplisit bahwa dunia sedang berada dalam "transformasi besar" dan menghadapi risiko-risiko eksistensial

serta krisis beruntun. Artinya, diagnosis kelembagaan sudah lebih jujur: problem global bukan sektoral, melainkan sistemik. ([AP News](#))

Kedua, pakta ini menghubungkan isu klasik dan isu baru dalam satu kerangka: keamanan, pembangunan, ketimpangan, iklim, hingga tata kelola digital dan AI (melalui *Global Digital Compact* yang menyertainya). Ini penting karena banyak krisis kontemporer justru lahir dari keterputusan antar-regim kebijakan. ([AP News](#))

Ketiga, pakta ini menghidupkan kembali agenda reformasi multilateralisme sebagai agenda “arus utama”, bukan hanya diskursus akademik atau posisi kelompok negara tertentu. Namun, seperti sering terjadi dalam diplomasi multilateral, keberhasilan adopsi tidak otomatis berarti keberhasilan implementasi. AP bahkan menekankan bahwa “bagian tersulit” dimulai setelah adopsi, yakni menyatukan negara-negara yang terbelah untuk menjalankan komitmen. ([AP News](#))

Secara manajerial, *Pact for the Future* dapat dipahami sebagai **dokumen strategi korporat tingkat global**: visi dan portofolio prioritas sudah ada, tetapi tantangan terberat adalah *execution discipline, resource alignment*, dan *governance follow-through*.

2.3 Reformasi Dewan Keamanan PBB: inti legitimasi politik yang paling sensitif

Salah satu elemen paling krusial dalam pakta tersebut adalah komitmen untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB. Dalam peliputan AP atas adopsi pakta, disebutkan bahwa komitmen reformasi mencakup upaya menjadikan Dewan Keamanan lebih representatif dan menanggapi ketidakadilan historis terhadap Afrika, sekaligus mengatasi keterwakilan yang kurang dari Asia-Pasifik dan Amerika Latin. ([AP News](#))

Selain itu, hasil pencarian atas teks final pakta menunjukkan **Action 39** yang menegaskan kebutuhan mendesak mereformasi Dewan Keamanan agar lebih representatif, inklusif, transparan, efektif, demokratis, dan

akuntabel. ([United Nations](#))

Sementara itu, halaman resmi PBB tentang reformasi DK (yang terindeks dalam hasil pencarian) juga menyoroti bahwa *Pact for the Future* memuat *Action 39* dan *Action 40* sebagai bagian dari dorongan baru terhadap proses *intergovernmental negotiations* (IGN). ([United Nations](#))

Namun, reformasi DK PBB adalah contoh klasik dari **paradoks reformasi institusi kekuasaan**:

semua pihak sepakat “perlu reformasi”;

tetapi hampir tidak ada konsensus tentang **desain reformasinya** (siapa mendapat kursi tetap, apakah veto diperluas/dibatasi, berapa ukuran dewan, model representasi regional, dsb.);

dan aktor yang paling diuntungkan oleh status quo memiliki kapasitas besar untuk memperlambat perubahan.

Dalam teori organisasi, ini mirip dengan restrukturisasi dewan direksi perusahaan di mana pihak-pihak yang memiliki hak suara dominan diminta merombak struktur yang memberi mereka keunggulan. Secara normatif mungkin rasional; secara politik sangat mahal.

Karena itu, pembacaan realistis atas reformasi DK bukan “apakah segera selesai”, tetapi **apakah prosesnya bergeser dari simbolik ke tekstual, dari tekstual ke negosiasi desain, dan dari desain ke koalisi implementasi**. Dalam hal ini, *Pact for the Future* penting karena memberi landasan legitimasi baru, tetapi belum menghapus hambatan struktural.

2.4 UN80 Initiative: reformasi internal sebagai jawaban atas krisis kepercayaan dan krisis fiskal

Jika *Pact for the Future* lebih banyak berbicara tentang arah normatif dan sistemik, maka **UN80 Initiative** menunjukkan dimensi reformasi yang lebih operasional. Sekretaris Jenderal meluncurkan inisiatif ini pada

Maret 2025 untuk membuat PBB tetap efektif, hemat biaya, dan responsif; UN Geneva mencatat bahwa inisiatif ini dibangun di atas upaya yang sudah berjalan, termasuk *Pact for the Future* dan UN 2.0. ([The United Nations Office at Geneva](#))

UN Geneva melaporkan bahwa pada November 2025, PBB mempresentasikan **UN80 Initiative Action Plan** dengan skala yang sangat besar: **87 aksi, 31 work packages**, dan **3 workstreams**, mencakup area dari operasi perdamaian, respons kemanusiaan, teknologi, layanan bersama, hingga kemungkinan merger institusi. Action Plan ini juga menekankan struktur implementasi (siapa bertanggung jawab, timeline, badan antarpemerintah terkait) serta dashboard publik untuk pelacakan kemajuan. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Dari perspektif tata kelola, ini adalah perkembangan penting karena reformasi internasional sering gagal bukan pada niat, tetapi pada *execution architecture*. UN80 mencoba menjawab hal itu melalui:

struktur koordinasi (Steering Committee dan Task Force),

pemecahan reformasi ke work packages yang lebih operasional,

keterkaitan dengan mekanisme penganggaran dan keputusan antar-negara,

pelacakan progres yang lebih transparan. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Namun, UN80 juga memperlihatkan kenyataan pahit: reformasi organisasi global sekarang tidak bisa dipisahkan dari **tekanan fiskal**. UN Geneva mencatat sumber daya sistem PBB diperkirakan turun tajam, dan inisiatif ini sendiri secara eksplisit disebut “bukan obat” untuk krisis pendanaan, melainkan bagian dari jawaban. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Reuters dan AP menambah konteks bahwa PBB menghadapi tekanan likuiditas serius akibat tunggakan iuran dan pemotongan pendanaan, bahkan ada peringatan tentang risiko kolaps finansial jika masalah struktural dan kepatuhan kontribusi tidak dibenahi. ([Reuters](#))

UN Geneva juga mencatat data kontribusi yang menunjukkan banyak negara anggota tidak membayar tepat waktu/penuh, sehingga krisis likuiditas menjadi persoalan kronis, bukan insidental. ([The United Nations Office at Geneva](#))

2.5 Pelajaran dari kasus PBB: reformasi tidak lagi bisa hanya normatif

Dari PBB, kita dapat menarik satu pelajaran besar: **reformasi multilateralisme harus bergerak di dua rel secara simultan:**

Rel legitimasi dan representasi (misalnya reformasi DK, pembaruan mandat, peran Global South), dan

Rel kapasitas operasional dan pendanaan (efisiensi, prioritas mandat, pembiayaan berkelanjutan, akuntabilitas).

Jika hanya mengejar rel pertama, institusi akan tampak lebih “adil” tetapi tetap lambat dan tidak efektif. Jika hanya mengejar rel kedua, institusi bisa lebih efisien tetapi kehilangan legitimasi politik di mata negara-negara yang merasa tak terwakili. Krisis multilateralisme menuntut keduanya sekaligus.

3) WTO dan Krisis Tata Kelola Perdagangan: Ketika Aturan Ada, tetapi Mekanisme Penegakannya Lumpuh

3.1 WTO sebagai pilar aturan ekonomi global yang mengalami “krisis fungsi inti”

Jika PBB adalah simbol universalitas, maka WTO secara historis adalah simbol **rule-based order** dalam perdagangan internasional. Kekuatan WTO bukan hanya pada forum negosiasinya, tetapi pada kombinasi tiga fungsi: negosiasi aturan, monitoring, dan **dispute settlement**.

Masalah besar WTO saat ini adalah bahwa salah satu fungsi inti—terutama penyelesaian sengketa pada level banding—mengalami disfungsi berkepanjangan. Hasil pencarian dari situs resmi WTO menyebutkan bahwa **Appellate Body saat ini tidak dapat meninjau banding karena kekosongan anggota yang berkelanjutan**. ([World Trade Organization](#))

Ini penting bagi Global South. Mengapa? Karena negara berkembang dan menengah sering kali tidak memiliki kekuatan ekonomi atau politik untuk membalas tindakan dagang secara unilateral. Mereka lebih bergantung pada **kepastian hukum** dan **forum adjudikasi** yang dapat menahan asimetri kekuatan. Ketika fungsi banding lumpuh, sistem tetap ada, tetapi daya paksa dan kepastian finalitas putusannya melemah.

3.2 MC13: ada kemajuan, tetapi bukan pemulihan penuh

Pada MC13 (Abu Dhabi, 2024), WTO memang menghasilkan beberapa keputusan. Situs berita resmi WTO (terindeks dalam hasil pencarian) mencatat bahwa konferensi berakhir dengan keputusan terkait reformasi sengketa dan isu pembangunan. ([World Trade Organization](#))

Dokumen MC13 yang terindeks juga menunjukkan adanya *draft ministerial decision on dispute settlement reform* dan berbagai dokumen agenda lain, menandakan bahwa isu reformasi sengketa menjadi salah satu agenda sentral. ([World Trade Organization](#))

Namun, kemajuan tersebut belum setara dengan **pemulihan penuh sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi baik dan dapat diakses semua anggota**. Sebuah dokumen Dewan Uni Eropa untuk posisi menghadapi MC14 (2026) merujuk pada keputusan menteri WTO di

MC13 (WT/MIN(24)/37), mengakui adanya progres dan instruksi untuk mempercepat diskusi, tetapi juga menegaskan bahwa target sistem yang sepenuhnya berfungsi pada 2024 tidak tercapai, dan prospek hasil di MC14 dinilai rendah. ([Data Consilium](#))

Secara analitis, ini menunjukkan WTO sedang berada dalam fase **reform without restoration**: ada proses reformasi, ada dokumen, ada fasilitasi, tetapi pemulihan fungsi adjudikasi inti belum terjadi.

3.3 Menuju MC14 (Yaoundé, 2026): reformasi sebagai agenda, konsensus sebagai hambatan

WTO secara resmi menetapkan MC14 akan berlangsung pada **26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun**. ([World Trade Organization](#))

Ini penting secara simbolik dan geopolitik, karena membawa panggung perundingan ke Afrika di tengah tuntutan Global South atas reformasi tata kelola perdagangan global.

WTO juga menyelenggarakan **Reform Week** pada Desember 2025 untuk mematangkan elemen-elemen reformasi yang dapat dibawa ke menteri di MC14. Hasil pencarian atas situs WTO menegaskan bahwa tujuan *Reform Week* adalah menyempurnakan elemen reformasi untuk pertimbangan para menteri. ([World Trade Organization](#))

Namun, justru di sinilah kita melihat dilema struktural WTO:

semakin banyak isu yang harus dibahas (sengketa, subsidi perikanan, pertanian, e-commerce, investasi, pembangunan, perlakuan khusus bagi negara berkembang, dll.);

tetapi mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus sering membuat paket hasil menjadi sangat sulit;

sementara dinamika geopolitik dan strategi blok meningkatkan kecenderungan *issue-linkage* (satu isu ditahan karena isu lain belum bergerak).

Dalam bahasa manajemen strategi, WTO menghadapi **overloaded agenda + constrained decision protocol**. Agenda membesar, kapasitas keputusan tidak ikut adaptif.

3.4 Krisis konsensus WTO: masalah prosedural atau masalah distribusi?

Banyak analisis menyebut "konsensus" sebagai sumber kebuntuan WTO. Namun secara akademik, konsensus bukan semata masalah prosedural; ia adalah **mekanisme yang memperlihatkan konflik distribusi yang belum terselesaikan**.

Negara-negara maju dan berkembang sering berbeda bukan hanya pada substansi, tetapi juga pada urutan prioritas:

sebagian mendorong isu efisiensi, digital trade, dan modernisasi aturan;

sebagian lain menekankan *policy space*, pembangunan, pertanian, perlakuan khusus-diferensial, dan fairness dalam implementasi aturan.

Karena itu, reformasi WTO akan gagal bila dibingkai hanya sebagai "mempercepat keputusan". Percepatan tanpa keadilan akan dipersepsi sebagai **reformasi untuk efisiensi pihak kuat**, bukan reformasi untuk legitimasi sistem.

Di sisi lain, mempertahankan status quo dengan alasan inklusivitas juga berisiko. Sistem yang terlalu lambat akan mendorong negara dan blok ekonomi berpaling ke:

perjanjian plurilateral,

FTA regional,

pengaturan unilateral atau bilateral,

instrumen keamanan ekonomi di luar WTO.

Jika itu terjadi, WTO tidak langsung mati, tetapi berisiko menjadi **forum arsip norma** alih-alih **forum produksi aturan yang hidup**.

3.5 Apa arti krisis WTO bagi Global South?

Bagi Global South, krisis WTO mengandung dua sisi.

Sisi risiko:

melemahnya jaminan aturan yang dapat menahan praktik koersif dagang;

meningkatnya biaya transaksi akibat fragmentasi aturan lintas FTA/rezim; berkurangnya akses efektif ke penyelesaian sengketa final;

meningkatnya ketidakpastian bagi ekspor, investasi, dan industrialisasi.

Sisi peluang:

ruang tawar lebih besar untuk menuntut reformasi yang lebih adil;

peluang membangun koalisi isu (misalnya pembangunan, kapasitas implementasi, digital inclusion);

peluang mengaitkan agenda WTO dengan agenda pembiayaan dan pembangunan melalui G20 dan lembaga keuangan internasional.

Dengan kata lain, Global South perlu berhenti memandang WTO hanya sebagai “tempat negosiasi tarif” dan mulai melihatnya sebagai **arena desain tata kelola pembangunan dalam ekonomi global yang terdigitalisasi dan bergejolak**.

4) G20: Fleksibel, Strategis, tetapi Terus Diuji oleh Fragmentasi Geopolitik

4.1 G20 sebagai “premier forum” yang efektif karena informal—sekaligus terbatas karena informal

G20 menempati posisi unik dalam tata kelola global. Ia bukan organisasi internasional formal seperti PBB atau WTO; ia tidak memiliki traktat,

sekretariat permanen yang kuat, atau mekanisme hukum yang mengikat seperti rezim adjudikasi WTO. Tetapi justru karena sifatnya yang lebih fleksibel dan berbasis kepemimpinan politik tingkat tinggi, G20 kerap menjadi ruang untuk **penjembatanan pragmatis** di tengah kebuntuan forum yang lebih formal.

Dalam Deklarasi Pemimpin G20 Afrika Selatan 2025, para pemimpin menegaskan kembali komitmen pada G20 sebagai "premier forum for international economic cooperation" dan menegaskan operasinya dalam semangat multilateralisme berbasis konsensus. ([DIRCO](#))

Deklarasi tersebut juga menegaskan pentingnya penguatan kerja sama multilateral untuk menghadapi risiko ekonomi global. ([DIRCO](#))

Tetapi G20 tetap menghadapi pertanyaan mendasar: bagaimana sebuah forum yang lebih lincah bisa tetap legitimate, inklusif, dan efektif ketika dunia semakin terpolarisasi?

4.2 G20 2025 di Afrika Selatan: kemajuan simbolik dan stres-test politik sekaligus

KTT G20 2025 di Afrika Selatan memiliki arti historis karena berlangsung untuk pertama kalinya di tanah Afrika, dan deklarasinya menegaskan bahwa Uni Afrika berada pada tahun kedua sebagai anggota penuh G20, sekaligus menekankan perlunya amplifikasi suara Afrika di forum internasional lainnya. ([DIRCO](#))

Secara representasi, ini adalah kemajuan penting. Keanggotaan Uni Afrika memperbaiki kritik lama bahwa G20 mengatur isu global tetapi tidak cukup merefleksikan kepentingan kawasan yang paling terdampak oleh krisis utang, iklim, dan pembiayaan pembangunan.

Namun AP melaporkan bahwa deklarasi diadopsi dalam konteks ketegangan, termasuk penolakan/boikot AS terhadap KTT, dan perbedaan atas prioritas seperti perubahan iklim dan ketimpangan.

Meski begitu, tuan rumah tetap berhasil mendorong adopsi deklarasi.
([AP News](#))

Ini memberi pelajaran penting tentang G20:

daya tahan (resilience) G20 cukup tinggi; deklarasi masih bisa lahir meski situasi politik tidak ideal,

tetapi **kedalaman konsensus** bisa menurun, sehingga deklarasi berisiko lebih normatif daripada operasional jika tidak ditopang tindak lanjut.

4.3 G20 sebagai penghubung antara krisis utang, MDB, IMF, dan agenda pembangunan

Salah satu kontribusi paling relevan G20 bagi Global South adalah perannya dalam isu **arsitektur keuangan internasional dan keberlanjutan utang**. Dalam deklarasi 2025, bagian tentang penguatan arsitektur keuangan internasional dan keberlanjutan utang menegaskan peran MDB (multilateral development banks), potensi reformasi *capital adequacy framework*, serta pengakuan bahwa banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi biaya pembiayaan tinggi, kebutuhan refinancing eksternal besar, dan arus keluar modal swasta yang menekan ruang fiskal. ([DIRCO](#))

Deklarasi juga mengaitkan isu ini dengan pembaruan tata kelola IMF, termasuk kuota dan representasi, meski dengan pengakuan bahwa konsensus akan membutuhkan kemajuan bertahap. ([DIRCO](#))

Dalam bahasa kebijakan publik, G20 berfungsi sebagai **forum orkestrasi**:

bukan pengambil keputusan hukum akhir,

tetapi tempat menyelaraskan arah politik lintas institusi (IMF, Bank Dunia/MDB, forum utang, dsb.),

dan tempat memberi sinyal prioritas kepada pasar, donor, serta negara anggota.

Ini relevan bagi pembahasan reformasi WTO dan PBB juga, karena banyak isu perdagangan, iklim, dan pembangunan kini bergantung pada pembiayaan transisi dan kapasitas fiskal. Dengan kata lain, **tanpa reformasi pembiayaan**, agenda reformasi aturan sering berhenti di level retorika.

4.4 Kelemahan struktural G20: legitimasi universal, kepatuhan, dan kontinuitas

Meski penting, G20 punya tiga keterbatasan utama.

Pertama, legitimasi universal terbatas.

G20 tidak mewakili semua negara. Deklarasi 2025 memang menekankan outreach kepada semua anggota PBB dan pengamat tetap, termasuk pertemuan menteri luar negeri G20 di sela Sidang Majelis Umum PBB. (DIRCO)

Namun outreach tidak sama dengan *co-decision*. Negara di luar G20 tetap bisa merasa terdampak oleh arah kebijakan tanpa ikut merumuskan.

Kedua, tidak ada mekanisme kepatuhan yang kuat.

G20 mengandalkan komitmen politik, reputasi, dan tekanan sebaya (*peer pressure*). Ini efektif untuk koordinasi makro tertentu, tetapi lebih lemah untuk isu yang memerlukan perubahan regulasi domestik yang mahal secara politik.

Ketiga, kontinuitas bergantung pada presidensi tahunan.

Setiap presidensi membawa prioritas, gaya diplomasi, dan kapasitas berbeda. Ini memberi fleksibilitas, tetapi juga risiko fragmentasi agenda dan kelelahan implementasi.

Karena itu, G20 paling efektif bila diposisikan bukan sebagai pengganti PBB atau WTO, melainkan sebagai **accelerator**: mempercepat konsensus

politik, menyiapkan paket kebijakan, dan mendorong koordinasi lintas institusi formal.

5) Krisis Multilateral sebagai Masalah “Interoperabilitas” Antar-Lembaga: PBB, WTO, dan G20 Tidak Bisa Direformasi Sendiri-Sendiri

Salah satu kekeliruan umum dalam diskusi reformasi global adalah membahas PBB, WTO, dan G20 secara terpisah seolah mereka bergerak di dunia yang berbeda. Padahal, banyak krisis kontemporer bersifat lintas-rezim:

konflik dan sanksi berdampak pada perdagangan dan pangan;

gangguan perdagangan menekan inflasi dan stabilitas politik;

krisis utang membatasi kapasitas negara membiayai transisi iklim dan kepatuhan terhadap standar;

regulasi digital dan AI memengaruhi daya saing, keamanan, dan hak asasi.

Karena itu, reformasi yang dibutuhkan bukan hanya reformasi internal masing-masing lembaga, tetapi juga **reformasi interoperabilitas antar-lembaga**.

5.1 Tiga fungsi yang perlu dihubungkan

Secara sederhana:

PBB unggul pada **legitimasi universal dan norma**;

WTO unggul pada **aturan perdagangan dan penyelesaian sengketa** (meski kini terganggu);

G20 unggul pada **koordinasi politik tingkat tinggi dan orkestrasi agenda ekonomi**.

Jika ketiganya bekerja selaras, tata kelola global dapat memperoleh kombinasi:

legitimasi + aturan + koordinasi eksekusi.

Masalahnya, selama ini banyak proses berjalan paralel:

PBB menghasilkan komitmen luas;

WTO bernegosiasi teknis dalam ritme yang berbeda;

G20 mengeluarkan deklarasi politik dan dorongan reformasi pembiayaan;

tetapi *follow-through* lintas lembaga sering lemah.

5.2 Ilustrasi naratif: krisis pangan global sebagai contoh kegagalan koordinasi lintas-regim

Bayangkan sebuah negara berkembang pengimpor pangan menghadapi gejolak harga global. Masalahnya tidak tunggal:

ada gangguan logistik dan perang (dimensi keamanan/PBB),

ada pembatasan ekspor dan friksi dagang (dimensi WTO),

ada tekanan kurs, suku bunga, dan utang yang membatasi subsidi pangan (dimensi G20/IMF/MDB).

Jika lembaga global bergerak sendiri-sendiri:

PBB mendorong seruan kemanusiaan,

WTO membahas aturan,

G20 membahas stabilitas makro,

maka negara tersebut tetap mengalami *policy gap* di tingkat implementasi.

Tetapi jika ada interoperabilitas:

G20 memfasilitasi pembiayaan darurat dan ruang fiskal,

WTO mendorong disiplin terhadap pembatasan perdagangan dan transparansi,

PBB mengoordinasi respons kemanusiaan dan legitimasi politik, maka hasil kebijakannya jauh lebih efektif.

Inilah mengapa reformasi multilateralisme perlu bergerak dari paradigma **“reform each institution”** ke paradigma **“reform the system of institutions”**.

6) Apa Arti Semua Ini bagi Global South?

6.1 Global South bukan lagi sekadar “penerima dampak”

Istilah Global South sering dipakai terlalu longgar. Namun dalam konteks tata kelola global, ia merujuk pada kumpulan negara yang secara umum menghadapi kombinasi:

ruang fiskal terbatas,

kerentanan terhadap shock eksternal,

kebutuhan pembangunan besar,

representasi yang belum sepadan dalam lembaga global.

Yang berubah saat ini adalah posisi politik Global South. Ia tidak lagi semata “penerima dampak”, tetapi semakin menjadi **aktor penentu agenda**—terutama melalui koalisi regional, BRICS+, G77, African Group, ASEAN, dan peran yang lebih besar di G20 (termasuk keanggotaan Uni Afrika sebagai anggota penuh). ([DIRCO](#))

Namun kenaikan posisi politik ini tidak otomatis menghasilkan kemenangan kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana mengubah **kapital politik** menjadi **desain reformasi yang operasional**.

6.2 Tiga jebakan strategis Global South dalam reformasi multilateralisme

Jebakan 1: Retorika representasi tanpa agenda teknis

Menuntut representasi lebih adil sangat penting, tetapi tanpa proposal teknis yang matang (misal model voting, tahapan reformasi, mekanisme transisi, indikator keberhasilan), tuntutan mudah dipinggirkan sebagai slogan.

Jebakan 2: Koalisi politik tanpa koherensi kebijakan

Negara-negara Global South tidak homogen. Kepentingan eksportir komoditas, negara pulau kecil, negara rentan utang, manufaktur menengah, dan negara konflik sangat berbeda. Koalisi perlu arsitektur internal agar tidak pecah di meja negosiasi.

Jebakan 3: Bergantung pada forum tunggal

Mengandalkan hanya PBB, atau hanya G20, atau hanya WTO, akan membatasi hasil. Strategi yang lebih efektif adalah **forum-linkage strategy**: memanfaatkan kelebihan tiap forum untuk memperkuat posisi di forum lain.

6.3 Dari “voice” ke “design power”

Tujuan strategis Global South seharusnya bukan hanya menambah suara (*voice*), tetapi memperoleh **design power**—kemampuan mempengaruhi rancangan aturan, prosedur, pembiayaan, dan metrik implementasi.

Contoh konkret:

di PBB: bukan hanya kursi dan retorika reformasi, tetapi juga desain mekanisme akuntabilitas implementasi *Pact for the Future*;

di WTO: bukan hanya menuntut pemulihan AB, tetapi juga desain transisi yang melindungi akses negara berkembang terhadap keadilan sengketa;

di G20: bukan hanya menekankan keadilan, tetapi juga menyiapkan proposal teknis untuk reformasi MDB, pembiayaan transisi, dan kerangka penanganan utang.

7) Implikasi Strategis bagi Indonesia: Dari Middle Power Diplomacy ke Architecture-Shaping Diplomacy

Indonesia memiliki posisi yang menarik: bukan negara kecil, bukan pula kekuatan besar; bukan pusat sistem, tetapi cukup besar untuk berperan sebagai **jembatan kepentingan**. Dalam konteks krisis multilateralisme, posisi seperti ini justru strategis.

7.1 Modal diplomatik Indonesia

Indonesia memiliki beberapa modal:

Kredibilitas sebagai negara berkembang besar dengan kepentingan nyata pada stabilitas perdagangan, pembiayaan pembangunan, dan tata kelola global yang lebih adil.

Pengalaman G20 (termasuk kapasitas *agenda-setting*).

Keanggotaan ASEAN yang memberi platform regional untuk konsolidasi posisi.

Tradisi diplomasi non-blok/pragmatis yang berguna di era polarisasi.

Namun modal ini perlu diarahkan pada agenda yang lebih spesifik dan lintas-forum.

7.2 Agenda Indonesia yang realistis dan bernilai tambah

a) Di PBB: dorong reformasi yang menghubungkan legitimasi dan kapasitas

Indonesia dapat mengambil posisi yang menekankan bahwa reformasi PBB tidak boleh berhenti pada representasi simbolik, tetapi harus mencakup:

efisiensi mandat,

pembiayaan berkelanjutan,

akuntabilitas implementasi,

dan kemampuan respons krisis yang lebih cepat.

UN80 memberi momentum untuk diskusi semacam ini karena sudah membuka bahasa reformasi operasional (work packages, dashboard, timeline, mandat, efisiensi). ([The United Nations Office at Geneva](#))

b) Di WTO: bela pemulihan sistem sengketa, sambil memperkuat agenda pembangunan

Bagi Indonesia, kepastian hukum dagang adalah kebutuhan strategis, terutama ketika negara menghadapi sengketa di sektor-sektor penting. Karena itu, pemulihan fungsi penyelesaian sengketa WTO harus tetap menjadi prioritas. Fakta bahwa Appellate Body belum berfungsi dan bahwa reformasi masih belum menghasilkan pemulihan penuh menunjukkan pentingnya tekanan diplomatik yang konsisten. ([World Trade Organization](#))

Tetapi posisi Indonesia akan lebih kuat bila ditingkatkan bukan semata sebagai kepentingan nasional kasus per kasus, melainkan sebagai bagian dari agenda:

fair development-oriented reform,

akses yang setara ke keadilan sengketa,

serta konsistensi antara transisi hijau, industrial policy, dan aturan perdagangan.

c) Di G20: dorong jembatan antara pembiayaan pembangunan dan reformasi institusi

G20 telah menegaskan agenda MDB, utang, dan reformasi kuota IMF dalam deklarasi 2025. ([DIRCO](#))

Indonesia dapat berperan sebagai pengusul kerangka integratif yang mengaitkan:

pembiayaan transisi,

ketahanan pangan/energi,

pembangunan industri,

dan stabilitas fiskal negara berkembang.

Dengan kata lain, diplomasi Indonesia dapat bergeser dari sekadar *issue participation* menuju **architecture-shaping diplomacy**: menawarkan desain jembatan antar-forum.

7.3 Contoh narasi kebijakan untuk konteks Indonesia

Bayangkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia bekerja dalam satu *task force* tata kelola global. Tujuannya bukan hanya menyiapkan pidato, tetapi menyusun **peta negosiasi lintas-forum**:

isu apa dibawa ke PBB untuk legitimasi normatif,

isu apa didorong di WTO untuk aturan dan sengketa,

isu apa dipacu di G20 untuk pembiayaan dan koordinasi politik,

serta indikator keberhasilan nasional (akses pasar, biaya pembiayaan, ketahanan fiskal, ruang kebijakan industri, posisi diplomatik).

Pendekatan semacam ini lebih sesuai dengan era krisis multilateral, karena banyak hasil internasional kini tidak lahir dari satu forum tunggal.

8) Arah Reformasi yang Lebih Realistis: Dari “Grand Reform” ke Portofolio Reformasi Bertahap

Banyak diskusi reformasi global gagal karena terjebak pada dua ekstrem: terlalu besar (utopis, sulit dinegosiasikan), atau terlalu kecil (teknokratis, tidak menjawab legitimasi).

Pendekatan yang lebih realistis adalah **portofolio reformasi bertahap** (*sequenced reform portfolio*), yaitu menggabungkan reformasi besar-jangka panjang dengan reformasi menengah dan cepat yang menghasilkan kepercayaan.

8.1 Prinsip desain reformasi (lintas PBB-WTO-G20)

Prinsip 1: Legitimasi dan efektivitas harus dipasangkan

Reformasi yang hanya mengejar efisiensi akan ditolak; reformasi yang hanya mengejar representasi akan macet. Desain harus menunjukkan trade-off dan manfaat timbal balik.

Prinsip 2: Transparansi proses sama pentingnya dengan hasil

UN80 memberi contoh penting melalui dashboard dan paket kerja terstruktur. Reformasi global membutuhkan visibilitas proses agar negara dan publik dapat menilai progres. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Prinsip 3: Pendekatan modular

Tidak semua isu harus selesai sekaligus. Paket modular memungkinkan kemajuan di area yang siap, sambil menjaga ruang negosiasi isu yang lebih sensitif.

Prinsip 4: Interoperabilitas antarlembaga

Setiap reformasi perlu diuji dengan pertanyaan: bagaimana ia berinteraksi dengan PBB, WTO, G20, dan lembaga pembiayaan?

Prinsip 5: Indikator implementasi

Komitmen tanpa metrik akan kembali menjadi retorika. Reformasi perlu indikator keluaran (output) dan dampak (outcome), bukan hanya deklarasi.

8.2 Portofolio reformasi untuk PBB, WTO, dan G20

A. PBB: tiga jalur reformasi

Jalur legitimasi politik: dorongan konsisten untuk reformasi DK PBB yang lebih representatif, terutama keadilan representasi Afrika dan kawasan yang underrepresented. ([AP News](#))

Jalur kapasitas operasional: implementasi UN80 (efisiensi, penyederhanaan, prioritas mandat, penguatan koordinasi sistem). ([The United Nations Office at Geneva](#))

Jalur keberlanjutan finansial: pembenahan aturan likuiditas, disiplin kontribusi, dan desain pembiayaan yang lebih stabil di tengah volatilitas politik donor. ([Reuters](#))

B. WTO: tiga jalur reformasi

Jalur pemulihan sengketa: fokus pada pemulihan fungsi penyelesaian sengketa yang dapat diakses semua anggota, bukan sekadar diskusi reformasi tanpa hasil. ([World Trade Organization](#))

Jalur manajemen agenda MC14 dan seterusnya: pemilahan isu berdasarkan kesiapan konsensus, agar agenda tidak overload. MC14 di Yaoundé dapat menjadi titik penting untuk menguji pendekatan ini. ([World Trade Organization](#))

Jalur legitimasi pembangunan: memastikan modernisasi WTO tidak mengorbankan ruang kebijakan dan kebutuhan pembangunan anggota berkembang.

C. G20: tiga jalur reformasi

Jalur inklusivitas substantif: memperdalam makna keanggotaan AU dan outreach dengan negara non-G20, bukan sekadar simbolik. Deklarasi 2025 sudah memberi sinyal ke arah ini. ([DIRCO](#))

Jalur eksekusi arsitektur keuangan: mempercepat tindak lanjut reformasi MDB, isu utang, dan representasi IMF yang telah ditegaskan dalam deklarasi. ([DIRCO](#))

Jalur konektivitas institusional: menjadikan G20 lebih sistematis dalam menyalurkan hasil politiknya ke PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, dan badan terkait.

9) Refleksi Konseptual: Krisis Multilateral Bukan Alasan Meninggalkan Multilateralisme

Di tengah frustrasi terhadap lambannya lembaga global, muncul godaan untuk menyimpulkan bahwa multilateralisme telah usang. Pandangan ini terlalu sederhana.

Yang sedang krisis bukan kebutuhan akan multilateralisme, melainkan **arsitektur multilateralisme warisan abad ke-20 yang sedang dipaksa bekerja di lingkungan abad ke-21**. Dunia sekarang ditandai oleh:

multipolaritas yang lebih cair,

teknologi yang mengubah kecepatan risiko,

keterikatan ekonomi yang tetap tinggi meski ada decoupling/derisking,

tekanan fiskal dan politik domestik yang membuat kompromi internasional makin mahal.

Dalam kondisi seperti ini, justru pilihan realistis bukan “multilateral atau tidak”, melainkan:

multilateralisme yang direformasi, atau

fragmentasi yang lebih mahal bagi semua, terutama negara-negara rentan.

PBB, WTO, dan G20 masing-masing menunjukkan bahwa sistem belum kolaps sepenuhnya:

PBB masih mampu menghasilkan pakta besar dan menjalankan agenda reformasi internal (meski di bawah tekanan fiskal dan politik). ([AP News](#))

WTO masih memiliki proses reformasi aktif menuju MC14 dan forum negosiasi yang tetap relevan, meski fungsi sengketa inti belum pulih. ([World Trade Organization](#))

G20 masih mampu menghasilkan deklarasi dan mengorkestrasi agenda ekonomi global, bahkan di tengah ketegangan geopolitik. ([AP News](#))

Artinya, tugas utama sekarang adalah **mendorong transformasi dari multilateralisme yang deklaratif menjadi multilateralisme yang eksekutif**.

10) Penutup: Reformasi PBB, WTO, dan G20 sebagai Proyek Manajemen Perubahan Global

Jika ditarik ke kerangka manajemen perubahan, krisis multilateralisme dapat dibaca sebagai organisasi besar yang menghadapi:

lingkungan eksternal yang berubah cepat,

struktur internal yang lambat,
konflik kepentingan pemangku kepentingan,
tekanan anggaran,
dan turunnya kepercayaan terhadap kinerja.

Dalam organisasi biasa, responsnya adalah diagnosis, prioritas, restrukturisasi, pembiayaan ulang, dan pembaruan tata kelola. Pada skala global, logikanya sama—hanya jauh lebih kompleks karena tidak ada “CEO dunia” dan tidak ada otoritas tunggal.

Karena itu, reformasi PBB, WTO, dan G20 harus dipahami sebagai **proyek manajemen perubahan global** dengan beberapa prasyarat:

Diagnosis yang jujur

Dunia telah berubah; institusi harus menyesuaikan mandat, proses, dan komposisinya.

Kepemimpinan koalisi, bukan dominasi tunggal

Reformasi hanya mungkin jika ada koalisi lintas kawasan dan lintas tingkat pembangunan.

Desain bertahap tetapi terukur

Kemajuan kecil yang terukur lebih berharga daripada janji besar tanpa implementasi.

Keterhubungan antar-forum

PBB, WTO, dan G20 harus diperlakukan sebagai ekosistem, bukan silo.

Peran aktif Global South

Bukan hanya menuntut ruang, tetapi menawarkan desain dan mekanisme yang dapat dijalankan.

Untuk Indonesia dan negara-negara serupa, era ini adalah ujian sekaligus peluang. Ujian, karena fragmentasi global meningkatkan biaya pembangunan, perdagangan, dan pembiayaan. Peluang, karena ketika

sistem lama goyah, aktor yang mampu berpikir lintas-forum, lintas-isu, dan lintas-koalisi justru bisa menjadi *agenda shaper*.

Dengan demikian, pertanyaan strategis ke depan bukan lagi “apakah multilateralisme masih relevan?”, melainkan: **multilateralisme seperti apa yang masih mampu bekerja dalam dunia yang terpolarisasi—dan siapa yang mau bekerja keras merancanginya?**

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka** (versi akademik ringkas) untuk makalah “**Tata Kelola Global di Tengah Krisis Multilateral: Reformasi PBB, WTO, dan G20.**” Istilah-istilah dipilih agar membantu pembaca memahami dimensi **kelembagaan, geopolitik, perdagangan, dan pembiayaan pembangunan** yang muncul dalam pembahasan reformasi PBB, WTO, dan G20. Beberapa istilah dirujuk ke sumber resmi PBB/WTO/G20 dan laporan berita untuk konteks mutakhir. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Glosarium

A. Konsep dasar tata kelola global dan multilateralisme

Tata kelola global (global governance)

Mekanisme, aturan, institusi, dan proses koordinasi antarnegara serta aktor non-negara untuk menangani masalah lintas batas (perdagangan, keamanan, iklim, kesehatan, utang, teknologi, dll.).

Multilateralisme

Kerja sama antar banyak negara berdasarkan prinsip, aturan, dan

prosedur yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, multilateralisme selalu dipengaruhi oleh distribusi kekuatan dan kepentingan politik.

Krisis multilateral

Kondisi ketika kebutuhan kerja sama global meningkat, tetapi lembaga-lembaga internasional mengalami penurunan efektivitas, legitimasi, atau kemampuan eksekusi.

Krisis legitimasi

Melemahnya persepsi bahwa suatu lembaga internasional mewakili kepentingan anggota secara adil, transparan, dan setara.

Krisis efektivitas

Ketidakmampuan institusi menghasilkan keputusan atau implementasi yang cukup cepat dan berdampak terhadap masalah global.

Krisis representasi

Ketimpangan keterwakilan negara/kawasan dalam struktur pengambilan keputusan (misalnya kritik terhadap representasi Global South dalam lembaga-lembaga global).

Barang publik global (global public goods)

Manfaat yang dibutuhkan bersama lintas negara dan sulit disediakan secara unilateral, seperti stabilitas keuangan, perdamaian, kesehatan global, dan iklim yang layak huni.

Fragmentasi geopolitik

Meningkatnya polarisasi dan rivalitas antarnegara/blok yang menghambat kerja sama global, termasuk dalam forum multilateral.

Arsitektur tata kelola global

Susunan kelembagaan global secara keseluruhan—siapa mengambil keputusan, dengan aturan apa, siapa membiayai, dan bagaimana kepatuhan dijaga.

Interoperabilitas antar lembaga

Kemampuan lembaga-lembaga global (misalnya PBB, WTO, G20, IMF, MDB) untuk saling terhubung secara fungsional sehingga respons kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

B. Istilah kunci terkait PBB dan reformasinya

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations)

Organisasi internasional universal dengan 193 negara anggota, berfungsi sebagai forum normatif, politik, dan koordinatif untuk isu perdamaian, pembangunan, HAM, dan kerja sama global. (Halaman UN Geneva menegaskan PBB sebagai forum “one-of-a-kind” untuk memajukan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan HAM.) ([The United Nations Office at Geneva](#))

Majelis Umum PBB (UN General Assembly)

Forum deliberatif universal PBB tempat semua negara anggota memiliki suara, dan menjadi arena penting untuk adopsi dokumen politik global.

Dewan Keamanan PBB (UN Security Council / DK PBB)

Organ PBB yang memiliki tanggung jawab utama atas perdamaian dan keamanan internasional; sering menjadi fokus kritik reformasi karena isu representasi dan veto.

Veto

Hak khusus anggota tetap Dewan Keamanan (P5) untuk memblokir resolusi substantif. Dalam debat reformasi, veto menjadi isu paling sensitif karena terkait distribusi kekuasaan historis.

Pact for the Future (Pakta untuk Masa Depan)

Dokumen hasil *Summit of the Future* (2024) yang dimaksudkan sebagai cetak biru pembaruan kerja sama global dan multilateralisme untuk tantangan abad ke-21. Sumber resmi PBB menempatkannya sebagai

agenda lintas tema (peace and security, development, climate, digital cooperation, dsb.). ([United Nations](#))

Global Digital Compact

Komponen terkait tata kelola digital global yang berkaitan dengan agenda *Pact for the Future*.

Reformasi Dewan Keamanan PBB

Upaya membuat DK PBB lebih representatif, inklusif, transparan, dan efektif. Perdebatan umumnya mencakup komposisi keanggotaan, kursi tetap/non-tetap, dan isu veto.

UN80 Initiative

Inisiatif reformasi internal PBB yang diprioritaskan Sekretaris Jenderal pada 2025 (tahun ke-80 PBB), untuk memastikan organisasi tetap efektif, hemat biaya, responsif, dan lebih selaras dengan kebutuhan abad ke-21. UN Geneva menekankan bahwa inisiatif ini membangun di atas reformasi sebelumnya, termasuk *Pact for the Future* dan UN 2.0. ([The United Nations Office at Geneva](#))

UN80 Action Plan

Rencana aksi reformasi sistem PBB yang dipresentasikan pada 2025, dengan paket kerja terstruktur (work packages/workstreams) untuk efisiensi, peninjauan mandat, dan perubahan struktural lebih dalam. ([The United Nations Office at Geneva](#))

Liquidity crisis (krisis likuiditas PBB)

Tekanan kas/keuangan PBB yang terjadi ketika kontribusi negara anggota tidak dibayar penuh atau tidak tepat waktu. UN Geneva menegaskan masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan memengaruhi kapasitas operasional PBB. ([The United Nations Office at Geneva](#))

C. Istilah kunci terkait WTO dan reformasi perdagangan global

WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia)

Lembaga multilateral yang mengatur aturan perdagangan internasional, forum negosiasi, pemantauan kebijakan perdagangan, dan penyelesaian sengketa.

Aturan perdagangan berbasis hukum (rules-based trading system)

Sistem perdagangan internasional yang mengandalkan aturan dan prosedur formal, bukan semata kekuatan politik/ekonomi negara tertentu.

Dispute Settlement (Penyelesaian Sengketa WTO)

Mekanisme formal WTO untuk menyelesaikan perselisihan antaranggota terkait penerapan aturan perdagangan.

Appellate Body (Badan Banding WTO)

Organ banding dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Halaman resmi WTO menyatakan badan ini saat ini tidak dapat meninjau banding karena kekosongan keanggotaan yang berkelanjutan. ([World Trade Organization](#))

Kekosongan keanggotaan Appellate Body

Kondisi tidak terisnya anggota badan banding WTO sehingga fungsi banding tidak berjalan normal.

MC13 (13th Ministerial Conference)

Konferensi tingkat menteri WTO ke-13 (Abu Dhabi, 2024), yang menjadi forum utama pembahasan berbagai isu reformasi WTO dan agenda perdagangan multilateral. (Dirujuk dalam arsip berita resmi WTO.) ([World Trade Organization](#))

MC14 (14th Ministerial Conference)

Konferensi tingkat menteri WTO ke-14 yang menurut halaman resmi WTO akan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun. ([World Trade Organization](#))

Reform Week (WTO Reform Week)

Rangkaian pembahasan intensif WTO (Desember 2025) untuk mematangkan elemen reformasi yang dapat diajukan kepada para menteri pada MC14. Hal ini disebut secara eksplisit dalam berita resmi WTO. ([World Trade Organization](#))

Konsensus (consensus rule) di WTO

Praktik pengambilan keputusan yang menekankan persetujuan anggota secara kolektif. Kelebihannya adalah inklusivitas; kelemahannya adalah potensi kebuntuan ketika isu makin kompleks dan terpolarisasi.

Plurilateral agreement

Perjanjian yang diikuti sebagian anggota (tidak seluruh anggota WTO), sering dipandang sebagai cara bergerak maju saat konsensus universal sulit dicapai.

MFN (Most-Favoured-Nation)

Prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional, di mana perlakuan istimewa yang diberikan kepada satu anggota harus diperluas kepada anggota WTO lainnya (dengan beberapa pengecualian tertentu).

Special and Differential Treatment (S&DT)

Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang/kurang berkembang dalam sistem WTO, terkait fleksibilitas implementasi dan kebutuhan pembangunan.

Policy space (ruang kebijakan)

Ruang manuver kebijakan nasional (industri, perdagangan, fiskal, sosial) yang masih dapat digunakan negara tanpa melanggar komitmen internasional.

D. Istilah kunci terkait G20 dan pembiayaan pembangunan

G20 (Group of Twenty)

Forum utama kerja sama ekonomi internasional tingkat pemimpin, bersifat informal namun berpengaruh dalam sinkronisasi arah kebijakan makro, keuangan, dan pembangunan global. Deklarasi G20 Afrika Selatan 2025 menegaskan kembali komitmen G20 sebagai *premier forum for international economic cooperation*.

Leaders' Declaration (Deklarasi Pemimpin G20)

Dokumen konsensus politik hasil KTT G20 yang merangkum posisi bersama, prioritas, dan arahan tindak lanjut. Meski tidak mengikat secara hukum, deklarasi berfungsi sebagai sinyal kebijakan global.

Inklusivitas G20

Upaya memperluas representasi dan keterhubungan G20 dengan kawasan/negara di luar anggota inti, termasuk melalui *outreach*. Deklarasi 2025 menyoroti pentingnya *outreach* dengan negara anggota PBB dan organisasi terkait.

Keanggotaan penuh Uni Afrika (African Union as full member of G20)

Deklarasi G20 Afrika Selatan 2025 menegaskan bahwa Uni Afrika berada pada tahun kedua sebagai anggota penuh G20 dan pentingnya amplifikasi suara Afrika.

Finance Track (G20)

Jalur kerja G20 yang berfokus pada isu keuangan, fiskal, stabilitas makro, arsitektur keuangan internasional, utang, dan lembaga keuangan multilateral.

Sherpa Track (G20)

Jalur kerja G20 yang menyiapkan agenda non-keuangan (misalnya pembangunan, kesehatan, energi, digital, ketenagakerjaan, dan isu lintas sektoral) menjelang KTT pemimpin.

Arsitektur Keuangan Internasional (International Financial Architecture / IFA)

Kerangka institusi, aturan, dan instrumen global yang mengatur stabilitas keuangan, likuiditas, utang, dan pembiayaan pembangunan (misalnya IMF, Bank Dunia, MDB, mekanisme utang).

Debt sustainability (keberlanjutan utang)

Kondisi ketika suatu negara dapat memenuhi kewajiban utangnya tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi dan kebutuhan pembangunan dasar. Deklarasi G20 2025 menyoroti tingginya biaya pembiayaan, kebutuhan refinancing eksternal, dan keterbatasan ruang fiskal banyak negara rentan.

Ruang fiskal (fiscal space)

Kapasitas pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan dan stabilisasi tanpa memicu risiko fiskal/utang yang berlebihan. Deklarasi G20 2025 mengaitkan kerentanan utang dengan penyempitan ruang fiskal negara berkembang.

MDB (Multilateral Development Banks / Bank Pembangunan Multilateral)

Lembaga keuangan multilateral (misalnya World Bank dan bank pembangunan regional) yang menyediakan pembiayaan pembangunan, dukungan kebijakan, dan bantuan teknis. Deklarasi G20 2025 menegaskan peran kritis MDB.

CAF (Capital Adequacy Framework)

Kerangka kecukupan modal yang dibahas dalam konteks reformasi MDB untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan kapasitas pembiayaan. Deklarasi G20 2025 menyebut potensi CAF dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya MDB.

G20 Common Framework (untuk penanganan utang)

Kerangka kerja G20 untuk penanganan utang negara yang melampaui

DSSI, dengan tujuan proses yang lebih terkoordinasi, tertib, dan dapat diprediksi. Deklarasi G20 2025 menegaskan komitmen memperkuat implementasinya.

Debt transparency (transparansi utang)

Keterbukaan informasi mengenai kewajiban utang, syarat pembiayaan, dan profil kreditur/debitur, agar risiko dapat dipetakan dan direspons lebih baik. Deklarasi G20 2025 menekankan pentingnya peningkatan transparansi utang.

E. Istilah analitis untuk membaca reformasi (berguna dalam kajian manajemen/publik)

Forum-linkage strategy

Strategi diplomasi yang menghubungkan beberapa forum (mis. PBB–WTO–G20) untuk memperkuat posisi negosiasi dan hasil kebijakan.

Architecture-shaping diplomacy

Pendekatan diplomasi yang tidak berhenti pada “ikut rapat” atau “menyatakan posisi”, tetapi berupaya membentuk desain aturan, prosedur, dan mekanisme implementasi.

Sequenced reform (reformasi bertahap berurutan)

Pendekatan reformasi yang disusun dalam tahapan prioritas: langkah cepat, menengah, dan struktural, agar perubahan lebih realistis secara politik.

Execution gap (kesenjangan eksekusi)

Jarak antara deklarasi/kesepakatan politik dengan implementasi nyata di lapangan—masalah yang sering muncul dalam tata kelola global.

Daftar Pustaka (Format APA 7 Ringkas)

A. Sumber resmi PBB dan sistem PBB

United Nations. (2024). *The Pact for the Future (final text)*. Summit of the Future / Office of the President of the General Assembly. ([United Nations](#))

United Nations. (n.d.). *Pact for the Future (official page)*. ([United Nations](#))

United Nations Office at Geneva. (2025, March 12). *Guterres prioritises UN reform to ensure taxpayers' money reaches those in need*. ([The United Nations Office at Geneva](#))

United Nations Office at Geneva. (2025, November). *UN presents UN80 Initiative Action Plan, setting coordinated path for system-wide reforms*. ([The United Nations Office at Geneva](#))

B. Sumber resmi WTO

World Trade Organization. (n.d.). *Appellate Body – Dispute settlement*. ([World Trade Organization](#))

World Trade Organization. (2026). *The WTO's 14th Ministerial Conference (MC14)*. ([World Trade Organization](#))

World Trade Organization. (2025, December). *WTO Reform Week concludes with...* (news item on MC14 reform preparations). ([World Trade Organization](#))

World Trade Organization. (2024, March 1). *MC13 news item / outcomes page*. ([World Trade Organization](#))

Catatan: Butir 8 merujuk ke berita resmi WTO terkait MC13 sebagaimana digunakan dalam pembahasan sebelumnya; bila Bapak ingin, saya bisa rapikan menjadi entri dengan judul lengkap persis dari halaman WTO.

C. Sumber resmi G20 (Presidensi Afrika Selatan)

G20 South Africa Presidency / DIRCO. (2025). *G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration*. Johannesburg.

D. Sumber berita internasional (konteks mutakhir)

Associated Press. (2024, September 23). *UN nations endorse a "Pact for the Future," and the body's leader says it must be more than talk*. AP News. ([AP News](#))

Associated Press. (2024, September 23). *UN: World leaders try to lay out a vision for the future*. AP News. ([AP News](#))

Associated Press. (2025, November 22). *Leaders adopt a declaration at the start of South Africa's G20 summit despite US opposition*. AP News. ([AP News](#))

Reuters. (2026, February 23). *World needs renewed security architecture against 'chaos and change', UN chief says*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, January 30). *Guterres warns of UN's "imminent financial collapse"*. Reuters. ([Reuters](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 23 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/699c3562-9014-839c-a748-092b1404fbb4>